



BRIN

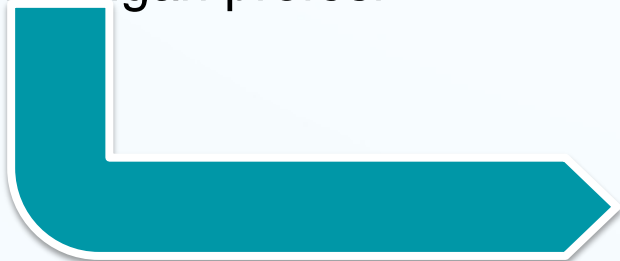
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DAN
PENGEMBANGAN PROFESI
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL
(BRIN)**



TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pembinaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi



FUNGSI

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi;
2. Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional;
3. Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional;
4. Pelaksanaan pengembangan standardisasi profesi;
5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi;
7. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan jabatan fungsional dan pengembangan profesi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
9. Pelaksanaan layanan sertifikasi profesi;



Mengelola Jabatan Fungsional dan bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan

1. Menyusun pedoman formasi JF;
2. Menyusun standar kompetensi JF;
3. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF;
4. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja;
5. Menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas;
6. Menyelenggarakan uji kompetensi JF;
7. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;
8. Melakukan sosialisasi JF;
9. Mengembangkan sistem informasi JF;
10. Memfasilitasi pelaksanaan tugas JF;
11. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;
12. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF;
13. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF; dan
14. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dalam rangka pembinaan karier;
15. Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga administrasi negara;
16. Menyusun kurikulum pelatihan JF;
17. Menyelenggarakan pelatihan JF;
18. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;

JABATAN FUNGSIONAL DIBAWAH BINAAN BRIN

AHLI

- Peneliti
- Perekayasa
- Analis Perkebunrayaan
- Analis Pemanfaatan Iptek
- Kurator Koleksi Hayati
- Penata Penerbitan Ilmiah
- Analis Data Ilmiah
- Pengembang Teknologi Nuklir

TERAMPIL

- Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
- Pranata Nuklir
- Teknisi Perkebunrayaan

JUMLAH PEMANGKU JF

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG



***7556**

PENELITI

3047

PEREKAYASA

**ANALIS
PERKEBUNRAYAAN**

36

**ANALIS
PEMANFAATAN
IPEK**

**KURATOR KOLEKSI
HAYATI**

13

**PENATA
PENERBITAN
ILMIAH**

7

ANALIS DATA ILMIAH

450

***PENGEMBANG
TEKNOLOGI NUKLIR
(PRANUK AHLI)**

2314

**TEKNISI
LITKAYASA**

368

**PRANATA
NUKLIR**

**TEKNISI
PERKEBUNRAYAAN**

* Data Hasil Penyetaraan dari Pemerintah Daerah dlm konfirmasi
** Pengembang Teknologi Nuklir sebelumnya merupakan JF Pranata Nuklir
Tingkat Ahli

**UPDATE PER: 31
Desember 2021**

JUMLAH PEMANGKU JF DI BRIN

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG



* Data Hasil Peralihan masih berproses
** Pengembang Teknologi Nuklir sebelumnya merupakan JF Pranata Nuklir Tingkat Ahli

**UPDATE PER: 31
Desember 2021**

Direktorat Pembinaan JF dan Pengembangan Profesi sedang bersurat ke K/L Pusat dan Daerah untuk permohonan update Data Pemangku JF Perekayasa dan Teknisi Litkayasa

PETA KONDISI AWAL

PETA KONDISI AWAL PASCA INTEGRASI PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN JF

NO	JABATAN	PERRMENPAN	REGULASI PEDOMAN FORMASI	NASKAH STANDAR KOMPETENSI	JUKNIS/JUKLAK PER BRIN	SKHK DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA	KEPPRES TUNJANGAN	APLIKASI PENILAIAN
1	Peneliti	Selesai	Selesai	Selesai	Dalam Proses Revisi		Akan diajukan Usul Kenaikan Kelas Jabatan untuk Jenjang Muda	ePeneliti
2	Perekayasa	Selesai	Belum Disusun	Selesai_Blm (Sesuai Permenpan Baru)	Blm (Sesuai Permenpan Baru)		Sudah disetujui Kenaikan Kelas jabatan	SIDUPER (Internal BPPT)
3	Teknisi Litkayasa	Selesai	Belum Disusun	Belum Disusun	Dalam Proses Revisi (Sesuai Permenpan Baru)		Sudah disetujui Kenaikan Kelas jabatan	
4	Pengembang Teknologi Nuklir	Selesai	Selesai	Belum Disusun	Dalam Proses Review (Sesuai Proses Bisnis BRIN)		R-Perpres sdh Harmonisasi >> Di Setneg	SIPATEN **
5	Pranata Nuklir	Selesai	Belum Disusun	Belum Disusun	Dalam Proses Review (Sesuai Proses Bisnis BRIN)			SIPRANUK**
6	Analisis Perkebunrayaan	Selesai	Selesai	Dalam Proses penyusunan draft >> Konfirmasi ke Syifa	Dalam Proses Revisi (Sesuai Proses Bisnis BRIN)		R-Perpres sdh Harmonisasi >> Di Setneg	SIJI
7	Teknisi Perkebunrayaan	Selesai	Selesai	Dalam Proses penyusunan draft >> Konfirmasi ke Syifa	Dalam Proses Revisi (Sesuai Proses Bisnis BRIN)		R-Perpres sdh Harmonisasi >> Di Setneg	SIJI
8	Kurator Koleksi Hayati	Selesai	Dalam Proses Penyusunan	Draft Selesai, Siap Submit ke Menpan	Selesai		Perbaikan NA Submitted, sdh Verifikasi Faktual dengan Kemenpan.	SIJI

MATRIX PERBANDINGAN KELAS JABATAN & TUNJANGAN 11 JF DI LINGKUNGAN BRIN

NO	NAMA	KELAS JF/	JENJANG JABATAN (AHLI-TERAMPIL)								DASAR TUNJANGAN			
		TUNJAB	PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	PEMULA	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA				
1	Peneliti	K	8	9	12	14					Perpres No. 100 Tahun 2012			
		TJ	1.100	1.750	3.000	5.500								
2	Perekayasa	K	8	9	12	14								
		TJ	325	750	1.200	1.400					Perpres No. 31 Tahun 2007			
3	Analisis Perkebunrayaan	K	8	9	11									
		TJ	Menunggu Pengundangan PerPres Tunjab dr Setneg											
4	Analisis Pemanfaatan Iptek	K	8	9	11	13								
		TJ	Menunggu Pengundangan PerPres Tunjab dr Setneg											
5	Kurator Koleksi Hayati	K	8	9	11	13								
		TJ	Menunggu Pengundangan PerPres Tunjab dr Setneg											
6	Penata Penerbitan Ilmiah	K	8	9	11	-								
		TJ	Menunggu Pengundangan PerPres Tunjab dr Setneg											
7	Analisis Data Ilmiah	K	8	9	11	13								
		TJ	Menunggu Pengundangan PerPres Tunjab dr Setneg											
8	Pengembang Teknologi Nuklir	K	8	10	12	14								
		TJ	*540	*1100	*1380	*2035					*Persetujuan			
	Dibayarkan Tunjangan PTN Ahli		325	750	1.200	1.400	Perpres No. 95 Tahun 2015							
9	Teknisi Penelitian dan Perekayasa	K					5	6	8	9	Perpres No. 31 Tahun 2007			
		TJ					250	250	300	450				
10	Pranata Nuklir	K									7	8	9	Perpres No. 95 Tahun 2015
		TJ									-	350	425	500
11	Teknisi Perkebunrayaan	K									5	6	7	8
		TJ									Menunggu Pengundangan PerPres Tunjab dr Setneg			

REKAP ISU JABFUNG OLEH KOMISI PROFESI PERISET

DISAMPAIKAN PADA PERTEMUAN AUDIENSI DENGAN DEPUTI SDM BRIN

SELASA, 11 OKTOBER 2022

PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR (PTN) DAN PRANATA NUKLIR (PN)

1. TERKAIT “PERISET”, APA GRAND DESIGN BRIN (KLO SUDAH ADA) SEBAGAI INSTANSI PEMBINA YANG MENDEKLARASIKAN PERISET HARUS BERBASIS OUTPUT (KI, PUBLIKASI, PATEN, LISENSI), BUKAN PROSES ? SEMENTARA JF PRANUK DAN PTN YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERMENPANRB NOMOR 2 TAHUN 2021 DAN NOMOR 75 TAHUN 2020 DISUSUN BERDASARKAN KEBUTUHAN BATAN TERKAIT PENGELOLAAN PERANGKAT NUKLIR DAN DILENGKAPI DENGAN PENGKAJIAN, RANCANG BANGUN SERTA PENDAYAGUNAAN IPTEK NUKLIR. PENYUSUNANNYA TENTULAH SUDAH DAN **SANGAT** MEMPERTIMBANGKAN KEBERADAAN JF PENELITI DAN JF PEREKAYASA AGAR **TIDAK TUMPANG TINDIH**, MENINGAT SEBAGIAN SDM BATAN SUDAH MENJADI PENELITI DAN PEREKAYASA. DENGAN DEMIKIAN MENJADI KENISCAYAAN BAHWA OUTPUT DARI PRANUK DAN PTN DIDOMINASI OLEH LAPORAN KEGIATAN SESUAI DENGAN BUTIR-BUTIR KEGIATANNYA YANG BERUPA PROSES. APAKAH PRANUK DAN PTN AKAN DIHAPUS ATAU BAGAIMANA ?
2. JF PTN DAN JF PRANUK SAMPAI SAAT INI BELUM MEMILIKI JUKNIS, SEHINGGA BELUM BISA MENGAJUKAN DUPAK (TERAKHIR PER DESEMBER 2020). SEBAGIAN BESAR PRANUK AHLI UTAMA BELUM DILANTIK (SBG PTN), SEMENTARA PTN PERTAMA, MUDA DAN MADYA YG DILANTIK SECARA VIRTUAL JUNI 2022 YL JUGA BELUM MENERIMA SK PELANTIKAN. HAL INI TENTUNYA CUKUP “MERESAHKAN” DAN MEMBINGUNGKAN, APALAGI BEBERAPA PRANUK DAN PTN TERSEBUT SUDAH KEBURU PENSIIUN SESUAI BUP NYA MASING2.

PENGEMBANG TEKNOLOGI NUKLIR (PTN) DAN PRANATA NUKLIR (PN)

3. MEMPERHATIKAN BAHWA JF PEREKAYASA (DAN LITKAYASA) AKAN DIBUATKAN PEDOMAN UNTUK PENILAIAN DUPAK BAGI KEGIATAN MULAI 1 JANUARI 2022 SEBELUM MENGGUNAKAN JUKNIS BARU PER JAN 2023, KAMI MOHON ADA LANGKAH SEJENIS YANG JUGA DILAKUKAN BAGI PRANUK (DAN PTN). SEMENTARA TERKAIT PEREKAYASA (DAN LITKAYASA) YANG HARUS MENILAIKAN KEGIATAN SD 31 DESEMBER 2021 DENGAN MENGGUNAKAN JUKNIS TERAKHIR (LAMA); PRANUK DAN PTN MENGHADAPI MASALAH KARENA TIDAK PUNYA JUKNIS LAMA SBG TURUNAN PERMENPANRB NOMOR 2 TH 2021 DAN NOMOR 75 TH 2021. UNTUK ITU MOHON SOLUSI YANG TIDAK MEMBERATKAN DARI BRIN.
4. TERKAIT TUNJANGAN JABATAN, TUNJANGAN KINERJA, BUP DAN LAIN-LAIN YANG TERKAIT KESETARAAN DIANTARA JF PERISET BRIN; PRANUK DAN PTN TENTUNYA AKAN SABAR MENUNGGU KARENA HAL TERSEBUT SANGAT TERKAIT DG MODEL GRAND DESIGN BRIN TENTANG PERISET DI BRIN YANG JADI BINAAN BRIN.

(TERKAAN) GRAND DESIGN SDMI – BRIN ???

- TERPILAH SESUAI LEMBAGA ASAL NYA (TERKOTAK2 DAN BERTINGKAT/"BERKASTA" – TUNJANGAN N BUP)
- DIINTEGRASIKAN (SPT LEMBAGANYA MENJADI BRIN) MENJADI "APA" DG PENGATURAN SEPERTI APA ?
- DISELARASKAN DENGAN ASUMSI APA ?
- TUNJAB ? DISAMAKAN ?
- GRADE TUKIN ??? BUP ?
- POSISI ORGANISASI PROFESI NYA ??
- REVISI PERMENPANRB UTK "HANYA SATU" JAFUNG PERISET (SDMI) DI BRIN (AK N JUMLAH PENULIS KTI)
- KELOLA, KAJI, RB N DAGUN (IPTEK NUKLIR) ?

PERMASALAHAN

JF LITKAYASA

1	JUKNIS	Baru diserahkan ke Tim BRIN bulan desember 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Kapan terbit2. Ada kendala
2	JUKLAK	Baru diserahkan ke Tim BRIN bulan desember 2021	<ol style="list-style-type: none">1. Kapan terbit2. Ada kendala
3	Syarat Ijazah formal	Diploma III (D-III)	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah ada peluang kuliah gratis2. Sampai berapa lama kesempatan mendapatkan ijazah D-III3. Apakah kuliah secara online dibolehkan4. Apa konsekwensi jika sudah diberi kesempatan hingga ...tahun tapi belum berijazah D-III
4	Eksistensi Litkayasa	Isu keberadaan Teklit Litkayasa simpang siur	<ol style="list-style-type: none">1. S-0 di 0 kan2.
5	Urutan Penulis di KTI	Maksimal ke-4	<ol style="list-style-type: none">1. Diharapkan tdak membatasi jumlah penulis

PERMASALAHAN

JF LITKAYASA

6	Teklit Baru	Bidang pekerjaan anggota JF Teklit yang beragam menyulitkan bagi sebagian dari anggota dalam menafsirkan butir kegiatan dalam juknis peraturan JF Teklit terutama anggota baru	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang sosialisasi2. Ada kendala dari personal? instansi?
7	Pengumpulan AK	Sebagian anggota mendapatkan penugasan dari atasan yang berbeda dengan kegiatan kelitkayasaan dianggap menyulitkan untuk mengumpulkan AK yang sesuai dengan butir kegiatan dalam juknis	<ol style="list-style-type: none">1. SDM Manajemen IPTEK
8	KTI pada SKP	Anggota yang bergabung dalam Pusat Riset diwajibkan memiliki luaran KTI (tim) setiap tahun terkait capaian SKP lembaga (tiap Ka.PR memiliki wewenang untuk menetapkan capaian anggotannya termasuk Litkayasa)	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap PR memiliki kebijakan berbeda2. Batasan maksimal penulis 4
9	Eksistensi Litkayasa	Dari segi teknis pekerjaan yg berkaitan dg angka kredit sudah sesuai atau sebagian besar sudah mengakomodir kegiatan teknis untuk bisa di klaim menjadi AK, akan tetapi untuk jenjang karir serta tunjangan masih berkesenjangan dengan JF lain padahal dengan beban kerja yang setara	<ol style="list-style-type: none">1. Jenjang karir2. Besaran Tunjangan fungsional dari tahun 2017 hingga saat ini masih sama
5	Urutan Penulis di KTI	Maksimal ke-4	<ol style="list-style-type: none">1. Diharapkan tdk membatasi jumlah penulis

HARAPAN

JF LITKAYASA

1	JUKNIS & JUKLAK	Segera terbit
2	Aplikasi SIJAFRI	Perlu dilakukan sosialisasi SIJAFRI
3	DIKLAT	Perlu adanya peningkatan ketrampilan dan kompetensi dengan berbagai pelatihan untuk mendukung kerja periset, pemangku pelaksana ataupun sebagai teknisi/ asisten para periset dalam melakukan penelitian
4	Eksistensi Litkayasa	JF Teklit tetap ada sebagai JF keterampilan yang masih diminati
5	Tunjangan Jabatan	Kenaikan tunjangan jabatan (sudah lama tidak naik)
6	Urutan Penulis di KTI	Jumlah Penulis KTI tidak dibatasi hanya 4 orang



JF ANALIS PEMANFAATAN IPTEK (JF API)

1. JUMLAH PENGAMPU JF API SAAT INI (DATA PER JANUARI 2022) = 34;
 - API AHLI PERTAMA = 7
 - API AHLI MUDA = 16
 - API AHLI MADYA = 8
 - API AHLI UTAMA = 3
2. PENGUSULAN ALIH JABATAN/INPASSING SEDANG DALAM PROSES PENILAIAN/ USULAN SUDAH MASUK CUKUP BANYAK;
3. PERPRES TERKAIT TUNJANGAN JF API BELUM ADA/ MASIH DALAM PROSES, SEMENTARA PEKERJAAN-PEKERJAAN TERKAIT JF API TERUS BERJALAN;
4. DIPERLUKAN SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN LEBIH LANJUT MENGENAI LINGKUP PEKERJAAN/ BUTIR KEGIATAN JF API;
5. DIPERLUKAN PELATIHAN-PELATIHAN YANG MENDUKUNG PENGAMPU JF API UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS-TUGASNYA DALAM MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, ALIH TEKNOLOGI, INKUBASI DAN DISEMINASI TEKNOLOGI;
6. PENEMPATAN PEGAWAI DAN PENETAPAN FORMASI, PERLU DISESUAIKAN DENGAN JENIS PEKERJAAN/BUTIR-BUTIR KEGIATAN JF API SEHINGGA DAPAT MENDUKUNG PENGEMBANGAN KARIR SEORANG JF API.

JF ANALIS DATA ILMIAH (JF ADI)

ORGANISASI

1. PEMBAGIAN TUGAS PEMBINAAN JF ADI ANTARA BOSDM, DEPUTI SDMI, DAN PPI BELUM JELAS. TERDAPAT BEBERAPA KEGIATAN DAN FUNGSI YANG TAMPAKNYA BERIRISAN ATAU TIDAK ADA YANG MENANGANI. SEHINGGA PERLU ADA KEBIJAKAN PIMPINAN UNTUK MENERBITKAN ATURAN TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI PEMBINAAN JF ADI.
2. PEMBINA TEKNIS PEJABAT FUNGSIONAL ADI BELUM SECARA TEGAS DITETAPKAN, SEHINGGA SERING TERKENDALA DALAM PELAKSANAAN TUGAS SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL ADI.
3. PRANATA ORGANISASI MASIH BANYAK YANG BELUM LENGKAP. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN PER LIPI NO. 7 TAHUN 2021 DAN PERMENPAN RB NO. 56 TAHUN 2020.

JF ANALIS DATA ILMIAH (JF ADI)

KINERJA

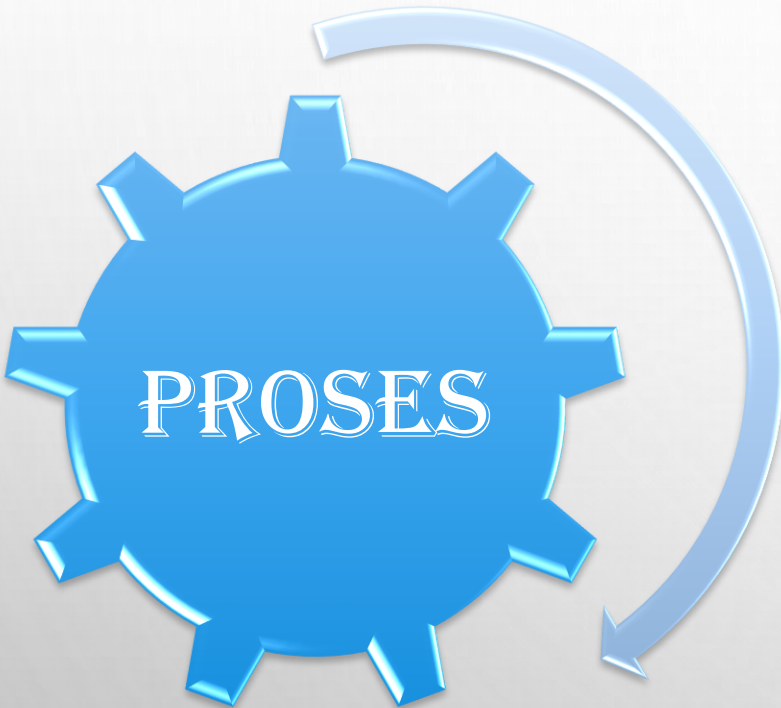
1. APLIKASI PENGUSULAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT BELUM SELESAI, SEHINGGA DAPAT MENGHAMBAT KENAIKAN PANGKAT SDM JF ADI YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN. PERLU DIBERIKAN KEBIJAKAN AGAR PENGUSULAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT DAPAT DILAKUKAN DENGAN CARA APLIKASI SEDERHANA (MS EXCEL) SAMBAL MENUNGGU SELESAINYA APLIKASI SIJAPRI UNTUK JF ADI.
2. TIM PENILAI ANGKA KREDIT JF ADI BELUM DIUSULKAN DAN DITETAPKAN, HAL INI JUGA DAPAT MENHAMBAT PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JF ADI YANG TELAH MEMENUHI SYARAT KENAIKAN PANGKAT BERKALA.
3. BELUM TERDAPAT JUKNIS ATAU PEDOMAN PENILAIAN AK JF ADI, DAN TIDAK JELAS UNIT KERJA YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENYUSUNNYA.
4. BERKAITAN AKAN DIBERLAKUKANNYA TARGET KKM MULAI TAHUN DEPAN BAGI SEMUA PERISET YANG DITEMPATKAN DI PUSAT RISET, SBG CONTOH UNTUK AHLI MADYA ADALAH JURNAL Q1/Q2. ANGKA KREDIT (AK) UNTUK PUBLIKASI JURNAL DI JABFUNG ADI BERBEDA SANGAT JAUH DENGAN AK DI JABFUNG PENELITI, SEBAGAI PERBANDINGAN UNTUK JURNAL Q1/Q2 JF PENELITI AKNYA 35-40, SEDANGKAN DI JF ADI AKNYA 20. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, UNTUK USAHA YANG SAMA. APAKAH ANGKA KREDIT JF ADI DAPAT DINAIKKAN ATAU DISESUIKAN SEPERTI/MENDEKATI DENGAN TARIF ANGKA KREDIT JF PENELITI.
5. APAKAH ADA MEKANISME KOLABORASI ADI YANG ADA DI PUSDATIN DENGAN PERISET-PERISET YANG ADA DI PR? APAKAH ADA ARAHAN DARI PAK KEPALA TERKAIT HAL TERSEBUT

JF ANALIS DATA ILMIAH (JF ADI)

KESEJAHTERAAN:

1. SESUAI DENGAN PERATURAN LIPI TENTANG JF PENELITI, BUP (BATAS USIA PENSIUN) PERISET AHLI MADYA 65 TAHUN DAN BERLAKU BAGI JF PENELITI DAN JF PEREKAYASA. MENGIKAT BEBAN KKM YANG SAMA, TAHUNAN SAMA BAGI SEMUA JF YANG ADA DI PUSAT RISET, APAKAH MEMUNGKINKAN DIBERLAKUKAN JUGA UNTUK JF ADI.
2. APAKAH MANTAN PENELITI DAN SEKARANG SUDAH IMPASSING JF ADI DAPAT DIBERI KESEMPATAN KEMBALI UNTUK MEMIMPIN TIM PENELITIAN?
3. TUNJANGAN FUNGSIONAL JF ADI SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM JELAS STATUSNYA. MOHON BANTUAN PIMPINAN UNTUK PERCEPATAN PROSES PENYELESAIANNYA.

JF ANALIS DAN TEKNISI PERKEBUNRAYAAN



2018

- PermenpanRB 31/2018: JF TP
- PermenpanRB 32/2018: JF AP

2019

- Perlipi 9/2019: Juknis JF AP
- Perlipi 10/2019: Juknis JF TP
- PerBKN 44/2019: Juklak Pembinaan JF TP
- PerBKN 45/2019: Juklak Pembinaan JF AP

2020

- Perlipi 1/2020: Pedoman Penghitungan Kebutuhan JF TP dan JF AP
- PP 17/2020: Perubahan atas PP 11/2017 ttg Manajemen PNS
- Perlipi 20/2020: Ukom JF AP dan JF TP
- Reorganisasi dan pemetaan SDM BRIN

2021

- Pembahasan Revisi Juknis dan Ukom
- Reorganisasi dan pemetaan SDM BRIN
- Pengusulan tukin JF Perkebunrayaan

2022

- Perpres 12/2022: Tukin JF Teknisi Perkebunrayaan
- Perpres 13/2022: Tukin JF Analis Perkebunrayaan
- Sertifikasi Asessor Perkebunrayaan
- Ukom JF TP dan JF AP (Gel.1 28/29 Sept; Gel.2 5 Okt; total 22 orang)

KENDALA & HARAPAN

KENDALA SAAT INI:

- Masa inpassing habis (2018-2020) sebelum JF dibuka dan kendala usia (53th teknisi dan 55th analis) membuat beberapa staf tidak bisa masuk JF Perkebunrayaan. Beberapa staf KR inpassing ke JF lain (Kurator Keanekaragaman Hayati) dan tetap di JF Litkayasa.
- Formasi untuk JF Perkebunrayaan saat ini tersebar di beberapa unit (Dir.PKI DIRI, Dir.KRI DKRI, Dir.KP DKRI/DRIDA), sementara butir kegiatan harus berkaitan erat dengan kebun raya.

HARAPAN:

- Kebijakan bagi pemegang JF KKH dan JF Litkayasa (khusus bagi yang tidak bisa inpassing atau terkena batas usia) agar bisa bekerja di KR.
- Kebijakan bagi pemegang JF AP dan JF TP di semua unit diberikan kesempatan untuk dapat bekerja di KR secara periodic untuk memenuhi kebutuhan AK/kinerjanya.

JF PENATA PENERBITAN ILMIAH

- ❖ BELUM ADA REGULASI TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL.
- ❖ BELUM TERSOSIALISASINYA INFORMASI PENATA PENERBITAN ILMIAH SECARA NASIONAL. SAAT INI PENGELOLA JURNAL ATAU PENERBITAN BUKU DI LITBANG/PERGURUAN TINGGI SERINGKALI MENJADI TUGAS TAMBAHAN ATAU PEKERJAAN SAMPINGAN DARI PROFESI LAIN. PADAHAL SEJATINYA PENERBIT ILMIAH ADALAH SEBUAH PROFESI YANG SPESIFIK DAN PROFESIONAL.
- ❖ TOTAL USULAN INPASSING JF PPI SEJUMLAH 23 ORANG; DALAM PROSES PENILAIAN STATUS TIDAK ADA; STATUS MEMENUHI SYARAT SEJUMLAH 21 ORANG; DAN STATUS TIDAK MEMENUHI SYARAT SEJUMLAH 2 ORANG

JF PENATA PENERBITAN ILMIAH

Kendala

- Sampai saat ini **belum** ada tunjangan jabatan fungsional.
- Info dari beberapa ASN di perguruan tinggi negeri, beberapa PTN **belum** mengakui JF ini karena dari Biro SDM PTN terkait belum mendapatkan surat/masih menunggu regulasi dari Kemdikbudikti. Apabila tidak ada maka pengajuan dari pegawai tidak akan diproses.

JF Kurator Koleksi Hayati (KKH)

1. Proses penerimaan usulan dari internal BRIN telah dilaksanakan. Sebanyak empat usulan telah masuk dan dua diantaranya TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), sehingga hanya dua orang yang menduduki JF KKH di jenjang Muda. Masih sedikitnya jumlah pendaftar, perlu segera dibuka formasi untuk JF KKH dari luar BRIN.
2. Peraturan terkait dengan tunjangan JF KKH diharapkan segera terbit, sehingga besaran tunjangan menjadi pertimbangan bagi peminat JF KKH untuk segera mendaftar dan menduduki formasi yang ada di JF KKH.

JF PENELITI

- ❖ PROSES MUTASI PENELITI DARI K/L KE BRIN BANYAK YANG MASIH BELUM SELESAI (MISAL EKS KEMANTAN), DENGAN KONSEKUENSI:
 - ✓ KEGIATAN PENELITIAN (TERUTAMA YANG BERSIFAT MULTIYEARS) TERHENTI KARENA ANGGARAN PENELITIAN MASIH DIBINTANG=>OUTPUT PENELITIAN YANG DITARGETKAN BISA TERTUNDA ATAU BAHKAN GAGAL TOTAL;
 - ✓ HAL INI MERUPAKAN KERUGIAN BESAR DALAM PROGRAM IPTEK DAN PEMBOROSAN ANGGARAN NEGARA;
 - ✓ PENELITI DIHADAPKAN PADA KONDISI KETIDAKPASTIAN, FRUSTASI DAN ADA RESIKO TIDAK DAPAT MEMENUHI TARGET AKT;

- ❖ MANAJEMEN BRIN DIHARAPKAN DAPAT MEMPERCEPAT PROSES MUTASI PENELITI SEHINGGA MEMBERIKAN RASA AMAN DAN KEPASTIAN TENTANG KARIR JFP DAN MENGHASILKAN OUTPUT SEPerti YANG DITARGETKAN;

JF PEREKAYASA

- **KEPASTIAN PENETAPAN JUKNIS BARU;** DRAFT SUDAH DISERAHKAN KE BRIN DESEMBER 2021.
- **KESESUAIAN DAN TERAKOMODIRNYA SISTEM KERJA SERTA PENILAIAN KINERJA DENGAN SISTEM KERJA YANG SPESIFIK BAGI TIAP JF;** SEBAGAIMANA TELAH DIAJUKAN DALAM DRAFT JUKNIS TERSEBUT UNTUK JF PEREKAYASA.
- **KESETARAAN TUNJANGAN JABATAN JF YANG TERGABUNG DALAM "PERISET"**



TERIMA KASIH